INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1992
TENTANG
SENSUS PERTANIAN TAHUN 1993

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Sensus Pertanian 1993 dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden agar Sensus Pertanian tersebut dapat diselenggarakan pada waktunya dengan aman dan tertib, tanpa mengabaikan persyaratan teknis serta ketelitian yang dihasilkan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2044);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2048);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1983 tentang Sensus Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3245);

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada: 1.Menteri Pertanian;
2.Menteri Kehutanan;
3.Menteri Koperasi;
4.Menteri Dalam Negeri;
5.Kepala Biro Pusat Statistik.

Untuk:

PERTAMA : Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, dan Menteri Koperasi:
a. memberi pengarahan tentang penyelenggaraan, ruang lingkup dan meteri yang dicakup dalam Sensus Pertanian Tahun 1993;

- b. berkonsultasi dengan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di dalam memberikan pengarahannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas.

KEDUA : Menteri Dalam Negeri:

menginstruksikan kepada para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk membantu dan mengamankan pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 1993 yang diselenggarakan oleh Biro Pusat Statistik sehingga Sensus Pertanian Tahun 1993 dapat menyelenggarakan pada waktunya dengan tertib dan lancar.

KETIGA : Kepala Biro Pusat Statistik:

- a. menyelenggarakan Sensus Pertanian 1993;
- b. mengatur agar tata cara dan tata laksana Sensus Pertanian 1993 diarahkan seefektif dan seoptimal mungkin sehingga dapat diperoleh data guna dimanfaatkan bagi rencana pembangunan;
- c. mengeluarkan pedoman, petunjuk dan instruksikan yang diperlukan bagi pejabat-pejabat bawahannya agar pelaksanaan sensus tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO
JENDERAL TNI

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1992